

ILMU BAHASA DALAM PERSPEKTIF KAJIAN BUDAYA

Anang Santoso

Jurusan Sastra Indonesia Fak. Sastra Universitas Negeri Malang

Abstract: The development of cultural studies has broadened the horizon of how to attend to and approach various cultural phenomena. In this regard, language, central to the notion of culture, has been assuming more strategic roles. Linguistics, accordingly, needs to accommodate broader views so as to go in line with the broader views of culture as the home base of linguistics. In this case, linguistics needs to build on the assumptions that (1) language is not innocent (neutral), (2) language deals with the issue of representation, (3) language has to do with power, and (4) language is concerned with articulation; this point is relevant to the development of cultural studies.

Key words: linguistics, cultural studies, positioning, language games, power.

Tulisan ini lebih merupakan renungan yang “agak serius” tentang apa yang selama ini sudah dirumuskan dalam pelbagai literatur kajian budaya (*cultural studies*) bahwa “bahasa merupakan perhatian utama dalam kajian budaya”. Storey (2003:x), misalnya, menyebutkan bahwa “bahasa merupakan alat dan medium untuk memunculkan arti penting atau signifikansi (*significance*) atau makna (*meaning*)”. Menginvestigasi budaya berarti mengeksplorasi bagaimana makna diproduksi secara simbolik di dalam bahasa sebagai sebuah sistem tanda (*signifying system*). Pandangan Storey semakin mengukuhkan peran bahasa –seperti sudah dikemukakan oleh Bourdieu, Foucault, dan Habermas, maupun oleh para pemikir pasca-modernisme– yang menempatkan bahasa dalam posisi sentral, sampai-sampai muncullah jargon *the linguistic turn* (lihat Santoso, 2006:i).

Pelbagai literatur–antara lain Cavallaro (2004), Storey (2003), Barker (2000)–menganalisis pandangan *language games* (Wittgenstein) dan *performative utterances* (Austin) untuk menunjukkan “bahasa” yang dimaksud dalam kajian budaya adalah “bahasa sehari-hari”, bukan bahasa logis. Wittgenstein menunjukkan bahwa bahasa mempunyai beberapa fungsi dan untuk memahaminya, perhatian harus dialihkan dari “logika dan penyusunan bahasa yang sempurna” kepada “logika bahasa sehari-hari”, yaitu bahasa *common sense*. Bagi Wittgenstein, bahasa bukanlah sebuah kehadiran metafisik, tetapi sebuah alat yang digunakan manusia untuk mengkoordinasikan tindakan-tindakannya dalam konteks hubungan sosial (Storey, 2003:ix). Makna sebuah kata bergantung pada penggunaannya dalam bahasa. Yang terpenting adalah “dalam situasi apa sebuah kalimat itu

digunakan sehingga kalimat melahirkan makna tertentu”.

Untuk melihat bahasa sebagai alat, kita harus menyugesti diri bahwa kita melakukan segala hal dengan bahasa. Bahasa adalah tindakan dan pembimbing menuju tindakan itu. Bahasa –dalam konteks penggunaan sosialnya– dapat secara temporer ditetapkan untuk tujuan-tujuan praktis.

Jika perhatian kajian budaya terpusat pada fungsi bahasa sehari-hari, ilmu bahasa mestilah merespon fungsi itu. Ada dua catatan penting berkenaan dengan rumusan tersebut. Pertama, ilmu bahasa berbasis fungsi berangkat dari premis bahwa bentuk bahasa merespon fungsi-fungsi penggunaan bahasa. Kedua, linguistik berbasis fungsi itu berangkat dari asumsi bahwa linguistik–seperti juga bahasa–memiliki fungsi-fungsi berbeda, tugas-tugas berbeda, dan sebagainya. Bentuk lingual akan merespon fungsi-fungsi lingual itu.

Untuk menjawab pertanyaan ilmu bahasa yang seperti apa yang relevan dengan kajian budaya, berikut dipaparkan secara berturut-turut: (1) kajian budaya–di dalamnya mencakup pengertian, ruang lingkup, dan konsep-konsep kunci–kemudian dilanjutkan dengan (2) ilmu bahasa yang berorientasi pada kajian budaya.

KAJIAN BUDAYA

Pengertian dan Ruang Lingkup

Kajian budaya (*cultural studies*) adalah sebetulnya teori yang dimunculkan oleh para pemikir yang memandang produksi pengetahuan teoretis sebagai sebuah praktik politik (Storey, 1993:vi). Pengetahuan tidak pernah menjadi fenomena yang netral atau objektif, tetapi selalu terikat pada nilai-nilai tertentu. Pengetahuan selalu lebih merupakan sebuah persoalan posisionalitas, kekinian-kenantian (*nowness-laterness*) dan kedisisian-kedisanaan (*hereness-thereness*),

persoalan tempat dari mana se-seorang berbicara, kepada siapa, dan untuk tujuan apa.

Kajian budaya merupakan gerakan keilmuan dan praksis kebudayaan yang mencoba cerdas-kritis menangkap semangat teori-teori budaya yang bias “kepentingan elite budaya dan kekuasaan” sembari merengkuhkan perhatiannya pada budaya-budaya yang selama ini tidak terjamah atau tidak diakui oleh ilmu-ilmu sosial humaniora tradisional yang telah mapan (Cavallaro, 2004:xiv). Karena sifatnya yang kritis, kajian budaya memiliki sifat disiplin dan metodologi yang sangat berbeda dengan ilmu-ilmu yang sudah mapan yang umumnya disipliner. Kajian budaya bersifat interdisiplin atau posdisiplin. Kajian budaya lebih bersifat eklektis.

Munculnya kajian budaya–paling tidak dapat dilihat dari pelbagai lingkup dan bidang yang menjadi garapannya–terkait erat dengan struktur politik yang menindas, patriarkis, dan rasis akibat dari persepsi mengenai kebudayaan yang salah kaprah. Konkretnya, sebuah kelompok, komunitas, atau masyarakat tidak jarang memandang dirinya lebih tinggi derajatnya daripada kelompok, komunitas, atau masyarakat lain sehingga dengan pandangan demikian, kelompok atau komunitas yang merasa lebih tinggi derajatnya sering melakukan penindasan–baik fisik, politik, ideologis, maupun kultural–terhadap kelompok atau komunitas lain yang dianggap lebih rendah.

Mengenai ruang lingkup kajian budaya diungkapkan secara jelas dalam Barker (2000), yakni (1) relasi antara kebudayaan dan kekuasaan, (2) seluruh praktik, institusi, dan sistem klasifikasi yang tertanam dalam nilai-nilai partikular, kepercayaan, kompetensi, kebiasaan hidup, dan bentuk-bentuk perilaku yang biasa dari sebuah populasi, (3) pelbagai kaitan antara bentuk-bentuk kekuasaan gender, ras, kelas, kolonialisme dan sebagainya dengan pengembangan

cara-cara berpikir tentang kebudayaan dan kekuasaan yang biasa digunakan oleh agen-agen dalam mengejar perubahan, dan (4) pelbagai kaitan wacana di luar dunia akademis dengan gerakan sosial dan politik, para pekerja di lembaga kebudayaan, dan manajemen kebudayaan.

Konsep-Konsep Kunci

Barker (2000) telah memberikan deskripsi yang jelas tentang delapan konsep kunci dalam kajian budaya, yaitu (1) kebudayaan dan praktik pemaknaan, (2) representasi, (3) materialisme dan non-reduksionisme, (4) artikulasi, (5) kekuasaan, (6) ideologi dan hegemoni, (7) teks dan pembacanya, serta (8) subjektivitas dan identitas. Beberapa konsep kunci yang relevan dengan topik tulisan ini dipaparkan berikut.

Kebudayaan dan Praktik Pemaknaan

Kajian budaya memandang kebudayaan terkait dengan pertanyaan tentang makna sosial (*social meaning*) yang dimiliki bersama, yakni berbagai cara kita memahami dunia ini. Akan tetapi, makna tidak semata-mata “mengawang-awang di luar sana”. Makna dibangun melalui tanda, khususnya tanda-tanda bahasa.

Kajian budaya menyatakan bahwa bahasa bukanlah media netral bagi pembentukan makna dan pengetahuan tentang dunia objek independen yang “ada” di luar bahasa. Sebaliknya, bahasa merupakan bagian utama dari makna dan pengetahuan tersebut. Bahasa memberikan makna pada objek material dan praktik sosial yang dibebankan oleh bahasa kepada kita. Proses-proses produksi makna merupakan praktik pemaknaan dan memahami kebudayaan berarti mengeksplorasi cara makna dihasilkan secara simbolis dalam bahasa sebagai suatu “sistem pemaknaan”.

Representasi

Bagian terbesar kajian budaya pada pertanyaan tentang representasi, yakni bagaimana dunia itu dikonstruksi dan direpresentasikan secara sosial kepada dan oleh kita. Unsur utama kajian budaya dapat dipahami sebagai kajian kebudayaan sebagai praktik pemaknaan representasi.

Dalam memahami representasi, kita diharapkan mengeksplorasi pembentukan makna tekstual. Tentu bukan makna teks yang vakum sosial. Kajian budaya menghendaki penyelidikan tentang cara dihasilkannya makna pada beragam konteks. Representasi dan makna budaya memiliki materialitas tertentu. Representasi dan makna melekat pada bunyi, prasasti, objek, citra, buku, majalah, dan program televisi. Makna budaya diproduksi, ditampilkan, digunakan, dan dipahami dalam konteks sosial tertentu.

Materialisme dan Nonreduksionisme

Sebagian besar kajian budaya memberikan perhatian pada ekonomi industri modern dan budaya media yang diproduksi pada sistem kapitalis tempat representasi diproduksi oleh perusahaan yang didorong oleh motif mencari laba. Selain memfokuskan pada praktik-praktik pemaknaan, kajian budaya berusaha menghubungkan mereka dengan ekonomi politik. Disiplin tersebut membicarakan kekuasaan dan distribusi sumber daya ekonomi dan sosial. Akibatnya, kajian budaya banyak membicarakan siapa yang memiliki dan mengontrol produksi budaya, distribusi dan mekanismenya, dan konsekuensi dari pola-pola kepemilikan dan kontrol tersebut bagi kontur lanskap budaya. Kajian terhadap media massa, misalnya, pada akhirnya mempertanyakan “siapa” yang memiliki dan mengontrol berita sehingga menciptakan perspektivitas tertentu (Fairclough, 1995).

Kekuasaan

Dalam kajian budaya, sentralitas konsep kekuasaan dipandang berlangsung pada setiap level relasi sosial. Kekuasaan bukan hanya perekat yang menyatukan kehidupan sosial, atau kekuatan koersif yang menyubordinasikan sekelompok orang atas orang lain, melainkan proses yang membangun dan membuka jalan bagi adanya segala bentuk tindakan, hubungan, atau tatanan sosial. Meskipun kadang-kadang kekuasaan benar-benar menghambat, kekuasaan juga dipahami sebagai sesuatu yang melapangkan jalan.

Terkait dengan kekuasaan tersebut, kajian budaya menunjukkan perhatian ekstraspesifik terhadap kelompok-kelompok pinggiran karena secara berturut-turut mulai soal kelas, ras, gender, kebangsaan, kelompok umur, dan sebagainya.

Ideologi dan Hegemoni

Ideologi berarti ‘peta makna’ (Barker, 2000:11). Selalu terdapat klaim bahwa ideologi sebagai kebenaran universal—yang merupakan pemahaman yang khas berdasarkan latar belakang sejarahnya—yang memerumit dan menjaga kekuasaan. Makna yang sebenarnya partikular menjadi seolah-olah universal secara bawah sadar. Ideologi sering menjadi sumber motivasi bagi anggota kelompok tertentu.

Hegemoni adalah proses penciptaan, perawatan, dan reproduksi makna dan praktik yang menguasai kehidupan masyarakat. Hegemoni berakibat kepada situasi di mana satu kelompok yang berkuasa menggunakan otoritas sosial dan kepemimpinan terhadap kelompok-kelompok subordinat lewat kemenangan konsensus, tanpa harus melalui ancaman fisik.

Teks dan Pembacanya

Teks dalam kajian budaya bukan hanya merujuk pada kata-kata tertulis, melainkan semua praktik yang memiliki makna. Termasuk di dalamnya adalah pembentukan makna melalui berbagai citra, bunyi, objek—seperti pakaian—dan aktivitas—seperti tari dan olahraga. Semua dinamakan “teks budaya”.

Kajian budaya mengkritik produksi konsensus yang berimplikasi kepada penyamaan masyarakat dengan makna budaya yang dibangun oleh praktik-praktik pemaknaan teks hegemonik. Makna budaya tidak ada yang stabil. Makna budaya adalah sesuatu yang “labil”.

Makna yang dibaca kritikus dalam “teks budaya” niscaya tidak sama dengan yang diproduksi oleh audien aktif atau “pembaca”. Pembaca tentu tidak akan berbagi makna yang sama antara yang satu dengan yang lain. Kritikus hanyalah bagian dari pembaca atau salah satu di antara sekian juta pembaca. Tidak ada kritikus yang menghegemonik rezim kebenaran. Teks sebagai bentuk representasi bersifat polisemis, artinya memiliki banyak arti.

Subjektivitas dan Identitas

Kajian budaya mengeksplorasi cara kita menjadi orang sebagaimana kita “sekarang dan di sini”, bagaimana kita diproduksi sebagai subjek, bagaimana diri kita menjadi laki-laki atau perempuan, bagaimana kita dibentuk sebagai pribadi-pribadi. Pelbagai argumen dalam kajian budaya terkenal dengan anti-esensialisme. Identitas bukanlah sesuatu yang eksis. Ia tidak memiliki kandungan universal atau esensial. Sebaliknya, identitas merupakan konstruksi diskursif, produk diskursus atau cara bertutur yang terarah tentang dunia. Identitas itu dibangun dan diciptakan—daripada ditemukan—oleh representasi, terutama bahasa. Tidak ada identitas yang begitu saja “hadir dalam keadaan jadi” di hadapan kita.

ILMU BAHASA YANG BERORIENTASI PADA KAJIAN BUDAYA

Dengan paparan tersebut, paling tidak, kita dapat memperoleh gambaran tentang sosok ilmu bahasa yang dikehendaki dalam kajian budaya. Tentu saja yang dimaksud adalah ilmu bahasa yang dapat memunculkan kesadaran kritis terhadap pelbagai penindasan itu. Berikut dipaparkan pokok-pokok pikiran ilmu bahasa seperti yang dimaksud dalam kajian budaya di atas.

Ilmu Bahasa Haruslah Bersifat “Kritis”

Karena kajian budaya begitu *gandrung* pada relasi antara kebudayaan dan kekuasaan, ilmu bahasa yang dimaksud adalah ilmu bahasa yang dapat menjangkau dimensi kekuasaan itu. Harapan ini--paling tidak--dapat ditemukan dalam linguistik kritis (*critical linguistics*).

Linguistik kritis merupakan kajian ilmu bahasa yang bertujuan mengungkap relasi kuasa tersembunyi (*hidden power*) dan proses-proses ideologis yang muncul dalam teks-teks lisan atau tulis (Crystal, 1991:90). Analisis linguistik belaka diyakini tidak dapat mengungkapkan signifikansi kritis. Menurut Fowler (1986:6) hanya analisis kritis yang merealisasikan “teks sebagai modus wacana” serta memperlakukan teks sebagai wacana yang akan dapat melakukannya. Linguistik kritis mengajak membicarakan arah teori bahasa dalam fungsi yang penuh dan dinamik dalam konteks-konteks historis, sosial, dan retorik.

Dalam relasinya dengan makna struktur lingual, sesuatu yang amat fundamental adalah terdapatnya fungsi relasi antara konstruksi tekstual dengan kondisi-kondisi sosial, institusional, dan ideologis dalam proses-proses produksi dan resepsinya. Struktur-struktur lingual digunakan untuk menyistematisasikan dan mentransformasikan realitas. Oleh karena itu, dimensi-dimensi sejarah, struktur sosial, dan

ideologi merupakan sumber utama pengetahuan dan hipotesis dalam kerangka kerja linguistik kritis (Fowler, 1986:8).

Analisis wacana publik merupakan sebuah analisis yang dirancang untuk (1) memperoleh atau menemukan ideologi yang dikodekan secara implisit di belakang proposisi yang jelas (*overt propositions*) dan (2) mengamati ideologi secara khusus dalam konteks pembentukan sosial (Fowler, 1996:3). Piranti-piranti untuk menganalisisnya adalah seleksi gabungan dari kategori deskriptif yang sesuai dengan tujuannya, khususnya struktur-struktur yang diidentifikasi Halliday sebagai komponen ideasional dan interpersonal. Selain itu, Fowler juga mengambil dari tradisi linguistik lainnya, misalnya saat ia menganalisis tindak-tindak ujaran dan transformasi.

Ilmu Bahasa Haruslah Bersifat “Instrumental”

Karena kajian budaya begitu *concern* terhadap seluruh praktik, institusi, dan sistem klasifikasi yang tertanam dalam nilai-nilai partikular, kepercayaan, kompetensi, kebiasaan hidup, dan bentuk-bentuk perilaku yang biasa dari sebuah populasi, ilmu bahasa tentu haruslah yang bersifat instrumental. Hal ini dapat ditemukan--paling tidak--dalam linguistik instrumental.

Linguistik instrumental dimunculkan sebagai penjabaran pandangan Halliday tentang konsep “instrumental” dalam linguistik fungsional-sistemik. Dalam pandangan Fowler (1996), istilah fungsional dalam linguistik fungsional memiliki dua pengertian. Pertama, linguistik fungsional berangkat dari premis bahwa bentuk bahasa merespon fungsi-fungsi penggunaan bahasa. Kedua, linguistik fungsional berangkat dari asumsi bahwa linguistik--seperti juga bahasa--memiliki fungsi-fungsi berbeda, tugas-tugas berbeda, dan sebagainya.

Bentuk linguistik akan merespon fungsi-fungsi linguistik itu.

Dalam wawancara dengan Herman Parret, Halliday (1978) menerima pandangan bahwa linguistik itu menjadi “linguistik instrumental”, yakni kajian bahasa untuk memahami sesuatu yang lain. Dengan demikian, sebuah linguistik instrumental memiliki relevansi karakteristik dengan tujuan yang akan dicapai. Linguistik instrumental juga memelajari hakikat bahasa sebagai fenomena keseluruhan. Oleh karena itu, menurut Halliday (1978:36), tidak ada kontradiksi antara “linguistik instrumental” dengan “linguistik otonom”. Linguistik instrumental adalah kajian bahasa untuk memahami sesuatu yang lain, misalnya sistem sosial. Linguistik otonom adalah kajian bahasa untuk memahami sistem lingual itu sendiri.

Ilmu Bahasa Haruslah Bersifat Pemberdayaan terhadap Subordinat

Karena kajian budaya mengurus pelbagai kaitan wacana di luar akademis dengan gerakan-gerakan sosial dan politik, ilmu bahasa sudah semestinya mengambil posisi pemberdayaan, khususnya kepada kelompok, komunitas, atau masyarakat yang secara fisik, politis, dan ideologis tertindas.

Sesuai dengan rumusan linguistik kritis yang bertujuan mengungkap relasi kuasa tersembunyi dan proses-proses ideologis, linguistik kritis amat cocok untuk menganalisis fenomena komunikasi yang penuh kesenjangan, yakni komunikasi yang hubungan antarpartisipannya tidak setara atau tidak simetris. Asumsinya adalah bahwa para pelaku dalam komunikasi selalu akan berorientasi memperjuangkan ideologi yang diyakininya. Partisipan yang lebih tinggi akan menggunakan ideologi untuk “menindas” atau “memeras”, sebaliknya yang lebih rendah akan menggunakan

ideologi untuk “menyembunyi-kan realitas subordinasi mereka”.

Beberapa komunikasi yang diyakini selalu penuh kesenjangan, antara lain (1) komunikasi dalam politik, (2) hubungan antara atasan dan bawahan, (3) komunikasi dalam wacana media massa, (4) komunikasi lintas budaya, dan (5) relasi antara laki-laki dan perempuan dalam politik jender. Menurut Fowler (1996:5), model linguistik kritis tersebut sangat memerhatikan penggunaan analisis linguistik untuk membongkar “misrepresentasi” dan “diskriminasi” dalam pelbagai modus wacana publik. Topik-topik yang diteliti meliputi masalah-masalah, seperti (1) seksisme, (2) rasisme, (3) ketidaksetaraan dan ketidakadilan dalam pendidikan, pekerjaan, pengadilan, dan sebagainya, (4) perang, (5) senjata nuklir dan kekuatan nuklir, (6) strategi politik, dan (7) iklan.

Untuk mencapai tujuan pemberdayaan, ilmu bahasa perlu menggunakan dua piranti yang saling berkaitan: (1) penidakakraban (*defamiliarisation*) dan (2) pemunculan kesadaran. Piranti pertama, yakni penidakakraban, kritis terhadap pelbagai fenomena lingual. Kritisisme lingual (*linguistic criticism*) memiliki dua tujuan. *Pertama*, kritisisme bertujuan “demistifikasi” (*demystification*), yakni demonstrasi praktik analisis terhadap penggunaan bahasa, terutama bahasa yang tampak tidak ada masalah apa-apa (*innocent*) dan alamiah. Penggunaan bahasa yang selama ini dianggap sebagai pengetahuan umum (*common sense*) harus dihadapkan pada “penidakakraban”. *Kedua*, kritisisme bertujuan “pengujian diri” dan “ketajaman perhatian” untuk menembus teks ke arah refleksi.

Piranti pertama, yakni penidakakraban, akan memunculkan kesadaran kritis bahwa ada yang tersembunyi dalam penggunaan bahasa. Analisis tidak begitu saja percaya dengan penggunaan bahasa tertentu tanpa sikap kritis itu. Dengan demistifikasi itu,

akan tampak dengan sejelas-jelasnya bahwa penggunaan bahasa yang tampak tidak ada apa-apanya, menampakkan wajah tidak berdosa, dan tampak alamiah ternyata menyembunyikan ideologi tertentu dari penghasil teks.

Ilmu Bahasa dan Kesadaran Kendala Nonlingual dalam Pilihan Bahasa

Karena kajian budaya begitu memerhatikan peran kekuasaan dan hegemoni pada setiap tataran sosial, ilmu bahasa seharusnya menyadari keberadaan kendala-kendala nonlingual dalam pilihan bahasa. Bentuk-bentuk bahasa digunakan individu tentu saja tidak secara bebas dapat dipilih.

Menurut Birch (1996:67) pilihan bahasa dibuat menurut seperangkat kendala (*constraints*) politis, sosial, kultural, dan ideologi. Ada kekuatan di luar individu yang ikut menentukan bentuk bahasa tertentu yang akan digunakan. Hal itu sering terjadi secara bawah sadar. Implikasinya adalah bahwa masyarakat dapat dimanipulasi, dikehendaki dalam aturan yang baik (*good order*), dan dinilai peran dan status bawahan serta atasan (*inferior-superior*) melalui sistem strategi-strategi sosial yang melibatkan aspek-aspek: kuasa, aturan, sub-ordinasi, solidaritas, kohesi, antagonisme, kesenangan, dan sebagainya yang semuanya merupakan bagian integral dari kontrol terhadap masyarakat.

Menurut Menz (1988), makna dan nilai dari pilihan bahasa bukan menjadi milik individu yang unik, tetapi diproduksi dalam perjuangan atau perebutan komunikatif (*communicative struggle*) dan interaksi aktual yang ditentukan secara ideologis dan dimotivasi secara politis (dalam Birch, 1996:65). Merujuk pada pandangan tersebut, aktor penghasil teks bukanlah individu yang “merdeka”, tetapi merupakan individu yang diatur oleh dimensi-dimensi sosiokultural dan institusional yang determinatif. Individu-individu sering

berada di bawah kesadaran dalam melakukan pilihan bahasa itu.

Ilmu Bahasa yang Memandang Teks sebagai Realisasi Modus Wacana

Karena kajian budaya memberikan perhatian pada ekonomi industri modern dan budaya media yang diproduksi pada sistem kapitalis, ilmu bahasa harus memandang teks sebagai realisasi modus wacana. Fowler (1986), misalnya, selalu memertahankan tesisnya bahwa teks merupakan realisasi sebuah modus wacana, biasanya lebih dari satu modus. Sebuah teks bukan hanya karya individual. Teks yang dihasilkan oleh penghasil teks sebagai individu bukanlah hasil dari keseluruhan individu itu. Teks yang dihasilkan mungkin saja berasal dari wacana praada (baca: sebelumnya) yang itu semua berakar pada kondisi-kondisi sosial, ekonomi, politis, dan ideologis yang terletak jauh di balik kesadaran dan kontrol penghasil teksnya. Sebuah teks yang lahir mungkin saja hasil dari suatu perjuangan di antara banyak tangan penghasil wacana itu.

Kajian bahasa hakikatnya adalah kajian kewacanaan yang bersifat historis. Sistem bahasa merupakan bagian yang integral dari struktur dan proses sosial. Sebuah wacana tidak dapat terlepas dari dimensi kesejarahan. Sebuah tuturan politik oleh seorang pemimpin partai, misalnya, bukanlah teks yang vakum sosial. Sebaliknya, teks tuturan itu dibentuk oleh sebuah proses yang rumit dan panjang dalam pertarungan sosial. Banyak “tangan” yang ikut campur menentukan bentuk dan isi teksturnya. Kajian terhadap teks-teks bahasa bukan semata-mata untuk kajian teks itu yang amat terbatas. Akan tetapi, kajian teks adalah kajian kewacanaan dengan mengikutsertakan dimensi kritis, yakni dimensi politis, ideologis, dan kultural tentang bagaimana masyarakat dan institusi membuat makna melalui teks.

Ilmu Bahasa Harus Memandang Bahasa sebagai Pengklasifikasi Pengalaman

Karena kajian budaya memfokuskan perhatiannya pada bahasa sehari-hari yang menghasilkan makna sosial, ilmu bahasa seharusnya memfokuskan pada makna-makna sosial yang bersifat situasional. Untuk itu, haruslah ditanamkan pada diri sendiri bahwa bahasa adalah pengklasifikasi pengalaman manusia tentang dunia.

Dunia tempat hidup manusia bersifat kompleks dan secara potensial membingungkan (Fowler, 1986:13). Kompleksitas hidup ditingkatkan melalui organisasi sosial dan aktivitas teknologis. Menghadapi dunianya yang kompleks, manusia melakukan “proses kategorisasi” sebagai bagian dari strategi umum untuk menyederhanakan dan mengatur dunianya itu. Manusia tidak menggunakan secara langsung dunia objektif, tetapi menghubungkannya melalui “sistem klasifikasi” dengan menyederhanakan fenomena objektif dan membuatnya menjadi sesuatu yang dapat dikelola.

Yang menjadi persoalan adalah bahwa klasifikasi sering memunculkan hasil yang bersifat alamiah (*natural*). Anggota masyarakat memerlukannya sebagai asumsi-asumsi—sebuah kebenaran yang tanpa pembuktian—serta memercayainya sebagai sesuatu yang berupa “akal sehat” (*common-sense*) atau pengetahuan umum. Semuanya itu dipandang sebagai sebuah kebenaran begitu saja. Kata-kata seperti “pandangan dunia”, “teori”, “hipotesis”, atau “ideologi” sering dianggap sebagai akal sehat. Sementara itu, menurut Fowler (1986:18), semua kata seperti itu adalah “distorsi”. Kata-kata itu lebih merupakan sebuah interpretasi atau representasi daripada sebuah refleksi. Implikasi dari penggunaan kata dan istilah yang penuh dengan akal sehat itu membuat masyarakat menjadi begitu percaya bahwa teorinya tentang cara dunia bekerja adalah “refleksi

alamiah”, bukan sebagai “refleksi kulturalnya”.

Menurut Fowler (1986:19), bahasa adalah medium efisien dalam pengodean kategori-kategori sosial. Ketika kebudayaan tertentu memerlukan ekspresi diskriminasi, peran bahasa sebagai pengkategorisasi tampak amat jelas. Bahasa tidak hanya menyediakan kata-kata untuk konsep-konsep tertentu, bahasa juga mengkristalisasikan dan menstabilisasikan ide-ide itu. Fowler ingin menunjukkan bahwa struktur bahasa yang dipilih menciptakan sebuah “jaring makna” yang mendorong ke arah sebuah perspektif tertentu. Jaring makna itu merupakan sebuah “ideologi” atau “teori” dari penuturnya yang—tentu saja—bukan berupa kategori alamiah. Jaring makna lebih merupakan kategori kultural. Masyarakat haruslah berkesadaran dan berpikir kritis dalam menghadapi kategori-kategori kultural itu.

Ilmu Bahasa dan Kesadaran Kritis terhadap Konvensi Sosial

Karena kajian budaya begitu memperhatikan peran ideologi dalam setiap aktivitas kehidupan, ilmu bahasa harus berangkat dari asumsi bahwa tanda-tanda bahasa tidak bersifat netral. Fowler (1986:27), misalnya, merumuskan bahwa kode lingual tidak merefleksikan realitas secara netral. Kode lingual itu menafsirkan, mengorganisasikan, dan mengklasifikasikan subjek-subjek wacana. Wacana tertentu selalu membentuk “teori” tentang bagaimana dunia itu disusun. Itulah yang disebut “pandangan dunia” atau “ideologi”. Bahasa tidak hanya sebagai pengetahuan yang internal dan pasif. Sebaliknya, bahasa adalah aktivitas yang dibawa dalam berbicara, menyimak, menulis, dan membaca yang aktual dan intensif setiap hari.

Untuk keperluan komunikasi, konvensi tentang bentuk dan makna bahasa memang diperlukan. Keputusan itu diambil agar antarpelaku komunikasi bisa saling ber-

hubungan satu dengan lainnya. Kebutuhan akan stabilitas makna merupakan sesuatu yang vital dalam relasi konseptual individu dengan dunianya itu. Pada tahap selanjutnya, kode-kode konvensi itu—yakni bahasa yang menyandikan pandangan dunia tertentu—akan diterima sebagai akal sehat oleh penggunaannya. Dalam konteks tersebut, peringatan Fowler perlu dicamkan, yakni “akal sehat itu bukan sesuatu yang alamiah, tetapi produk dari konvensi sosial”. Oleh karena itu, akal sehat itu perlu dikritisi.

Akal sehat memang bersifat “menyengangkan”. Akal sehat sangat diperlukan untuk kebutuhan komunikasi. Hanya saja, perlu diperhatikan dua sisi negatif akal sehat, yaitu (1) masalah legitimasi dan (2) masalah pembiasaan (*habitualization*).

Legitimasi berkenaan dengan tersedianya makna dalam individu yang bukan berasal dari individu itu. Makna itu sudah disandikan dalam bahasa yang diperolehnya sebagai anak. Dengan demikian, bahasa itu adalah bahasa masyarakat, yakni bahasa yang dianggap “resmi” oleh kebudayaan-kebudayaan yang dianggap dominan. Dominasi bahasa yang terlegitimasi berlangsung melalui kehidupan kita. Banyak kosakata yang bermuatan kepentingan-kepentingan politis dan ekonomis yang bersifat “prasangka”.

Pembiasaan berkaitan dengan kemapanan makna dalam pikiran anggota masyarakat. Tindakan seperti ini sering bersifat otomatis dan tidak analitis. Pembiasaan dalam penggunaan bahasa membawa kita kepada analogi yang berbahaya. Kita begitu saja mudah melakukan analogi tanpa sikap kritis. Kritisisme memiliki peran dalam memberantas tendensi-tendensi nonkritis tersebut.

Ilmu Bahasa Harus Menempatkan Teks dalam Konteks

Karena kajian budaya selalu memersoalkan posisionalitas, kekinian-kenanti-

an, kedisinian-kedisanaan, persoalan tempat seseorang berbicara, kepada siapa, dan untuk tujuan apa, ilmu bahasa harus menonjolkan peran konteks dalam tafsir teks.

Terkait dengan itu, ada dua hal penting berkaitan dengan penyusunan teks yakni “kalimat” dan “teks”. Teks berisi kalimat-kalimat yang dihubungkan secara bersama-sama melalui cara-cara tertentu. Sebuah kalimat berisi satu proposisi atau lebih. Banyak kalimat mengekspresikan lebih dari satu proposisi.

Menurut Fowler (1986:56), sebuah proposisi adalah sebuah unit makna abstrak. Untuk sampai kepada kalimat terdapat “realisasi” atau “ekspresi” antara ide abstrak dan bentuk kalimat yang konkret. Proposisi harus diekspresikan secara sintaksis sebagai urutan kata atau frasa yang diatur secara tetap. Proses-proses kombinasi, pengaturan kembali, penghilangan, dan sebagainya yang mencampuri antara makna proposisi dan bentuk sintaktik dikenal dengan “transformasi”. Fowler menegaskan bahwa secara transformasional susunan seperangkat proposisi yang sama dapat menimbulkan pengaruh makna yang berbeda atau “perspektif makna” yang berbeda.

Dari kalimat yang ada, kemudian, disusun sebuah teks. Dalam konteks tersebut, Fowler (1986:60) merumuskan bahwa penyusunan teks tidak hanya menjalankan kalimat dengan makna-makna individu yang dimilikinya dan kaidah bagi struktur ekspresi makna-makna yang mungkin. Lebih dari itu, dalam teks kalimat-kalimat itu dihubungkan satu dengan yang lainnya melalui jaringan yang kompleks dari pertalian-pertalian yang melibatkan sejumlah bagian-bagian struktur yang berbeda—seperti kosakata, pronomina, penghilangan kalimat, dan sebagainya. Jika hal itu dijalankan, menurut Fowler, sebuah teks dapat dianggap sebagai sebuah “komunikasi yang pantas” (*sensible communication*) sesuai dengan harapan

(*expectation*) pembaca. Hanya saja harapan itu sering tidak tercapai.

Tiga persyaratan diharapkan terpenuhi dalam penyusunan teks, yakni kohesi, progresi, dan tematisasi (Fowler, 1986:61).

- Kohesi berkenaan dengan pengorganisasian teks dalam relasinya dengan harapan pembaca: (1) teks itu koheren, (2) terdiri atas satu topik, dan (3) tidak terjadi lompatan yang tidak diharapkan dari subjek satu ke subjek yang lain.
- Progresif berkenaan dengan harapan pembaca agar dalam teks itu tidak mengulang-ulang pokok persoalan yang sama secara tetap. Sebaliknya, pembaca selalu mengharapkan dalam teks hadir perkembangan argumen atau naratif. Pembaca selalu menafsirkan pasangan kalimat yang berhubungan secara logis atau kronologis. Pembaca selalu mengharapkan agar proposisi dalam sebuah teks yang kohesif disusun dalam rangka membuat urutan ide-ide yang progresif.
- Tematisasi berkenaan dengan harapan pembaca agar organisasi teks menggambarkan perhatian kepada bagian isinya yang sangat penting, yakni "tema".

Catatan penting dikemukakan oleh Fowler (1986:70) bahwa satuan bahasa dalam penggunaan yang nyata lebih dari sekadar sebuah "teks" yang dibangun bersama-sama dengan konvensi dasarnya, tetapi lebih banyak berupa "wacana" dari yang sudah dilahirkannya itu. Fowler membedakan konsep "teks" dan "wacana". Untuk melihat bahasa sebagai teks, kita dibawa kepada kajian keseluruhan unit-unit komunikasi yang dilihat sebagai struktur sintaksis dan semantik yang koheren yang dapat diucapkan atau ditulis. Dalam pandangan kritis, teks dipandang secara dinamis sebagai komunikasi interpersonal dalam konteks.

Teks dapat dipandang sebagai "medium" wacana. Untuk melihat bahasa sebagai wacana, kita dibawa kepada keseluruhan proses interaksi lingual yang rumit antara masyarakat yang menghasilkan dan masyarakat yang memahami teks. Oleh karena itu, untuk mengaji bahasa sebagai wacana kita perlu memerhatikan tiga hal, yaitu (1) tahap-tahap struktur yang menghubungkannya dengan partisipan dalam komunikasi, (2) tindakan yang mereka munculkan melalui teks yang dihasilkan, dan (3) konteks dalam wacana yang dibangun. Semua faktor "ekstralinguistik" itu direfleksikan secara sistematis ke dalam struktur kalimat yang dihasilkan penutur.

Ilmu Bahasa dan Pengintegrasian Aspek-Aspek Dialog

Karena kajian budaya begitu memerhatikan logika bahasa sehari-hari, ilmu bahasa haruslah mengintegrasikan aspek-aspek dialog dalam jabaran teoretisnya. Aspek-aspek dialog yang perlu diintegrasikan adalah (1) pengurutan, (2) tindak ujaran, dan (3) implikatur (Fowler, 1986: 102). Ketiganya adalah teks yang berisi struktur dialogis yang sering begitu saja dianggap sebagai *common sense* sehingga perlu dihadapkan pada kerangka kerja kritisisme.

Pengurutan (*sequencing*) adalah pengaturan kontribusi terhadap percakapan. Terdapat konvensi yang rinci untuk menyusun pembukaan, mengembangkan dan menutup percakapan, mengendalikan peserta, menginterupsi, dan mengambil giliran. Konvensi-konvensi itu bervariasi menurut latar, status, hubungan pembicara, dan topik wacana. Perbedaan pengurutan berimplikasi pada segi ideologi tertentu. Hal tersebut tampak nyata dalam wacana politik.

Tindak ujaran adalah teori yang penting untuk mengaji teks-teks dialogis. Pemahaman dasar teori tindak ujaran berkenaan

dengan pandangan bahwa penggunaan bahasa memiliki dimensi ekstra—yang agak dihindari oleh ahli logika dan linguistik—yakni dimensi “performatif”. Para filsuf tindak ujaran mengamati bahwa bahasa memiliki “fungsi pragmatik”. Tuturan digunakan untuk menampilkan tindakan. Prinsip tersebut mudah dipahami dalam hubungannya dengan ujaran tertentu yang berisi verba-verba performatif, seperti: *promise, declare, name, baptize, request, order, guarantee*, dan sebagainya. Sebuah tindak ujaran bukan hanya mengatakan sesuatu, tetapi juga melaksanakan sesuatu melalui “berbicara”. Kriteria keberhasiannya bukan pada apakah ujaran itu benar, tetapi pada apakah ujaran itu memenuhi “asas kesatuan”. Semua tindak ujaran memiliki kondisi kebenaran masing-masing, berbeda dari satu kasus ke kasus lainnya.

Implikatur berkaitan dengan makna tradisional ketika seseorang mengatakan sesuatu dan berarti sesuatu yang lain (Fowler, 1986:106). Hal itu dapat dilakukan dengan penggunaan ironi dan metafora. Implikatur adalah proposisi yang muncul dari suatu yang dikatakan, tetapi tidak secara aktual dimuat dalam kata-kata yang diujarkan, juga secara logis dapat diperoleh dari yang dikatakan itu. Hal tersebut sangat sesuai dengan teori Grice tentang “prinsip kerja sama” (*cooperative principle*). Grice menyarankan agar percakapan terjadi di bawah bimbingan prinsip kerja sama yang mengikat penutur untuk mengekspresikan mereka sendiri dalam cara yang tidak mengganggu interpretasi (Fowler, 1986: 106). Sebaliknya, pendengar beranggapan bahwa apa pun yang dialamatkan kepada mereka dirancang untuk membuat makna agar mereka dapat berusaha mendapatkan interpretasi itu. Implikatur percakapan muncul saat pendengar memutuskan bahwa penutur sudah melanggar dengan sengaja satu dari maksim-maksim itu. Pelanggaran itu dapat dilakukan penutur dengan

“menggunakan ironi untuk melanggar maksim kualitas” atau “menggunakan ekspresi hiperbolis untuk melanggar maksim kuantitas”.

Meskipun teori implikatur yang sudah dikemukakan Grice ini dalam terminologis yang sangat informal dan masih kabur dalam perinciannya, teori tersebut dapat memperkaya pandangan kita tentang bagaimana wacana itu bekerja dan menjanjikan banyak pemahaman terhadap kritisisme linguistik (Fowler, 1986:107). Sejauh dialog itu diperhatikan, teknik pelanggaran maksim dan pemunculan implikatur adalah pusat struktur dialogis. Prinsip kerjasama mewujudkan sebuah harapan tidak hanya pada kemauan untuk saling membantu, tetapi juga sebuah persetujuan untuk membawa ke arah pemahaman tuturan terhadap pengetahuan bersama.

Ilmu Bahasa Harus Memusatkan pada Makna Sosial

Karena kajian budaya memandang kebudayaan terkait dengan pertanyaan-pertanyaan tentang makna sosial, ilmu bahasa haruslah memusatkan kajiannya pada makna-makna sosial itu. Untuk itu, perlu ada kesadaran dari kita bahwa bahasa berperan penting dalam pengklasifikasian pengalaman penutur. Fowler (1986:147) menegaskan bahwa bahasa berperan penting dalam penyusunan klasifikasi pengalaman penutur atau dalam pandangan Halliday bahasa memiliki fungsi pengalaman atau ideasional.

Terkait dengan pengklasifikasian tersebut, perlu dikemukakan dua jenis makna yang dapat dimasuki penutur, yaitu (1) makna alamiah (*natural meaning*), dan (2) makna sosial (*social meaning*). Makna alamiah lebih bersifat semesta (*universal*), dalam pengertian bahwa semua manusia secara biologis dilengkapi alat untuk membuat diskriminasi atau klasifikasi.

Konsep tentang “atas-bawah”, “lebih besar daripada”, “segiempat”, dan “merah” mengandung makna alamiah. Sebaliknya, makna sosial merefleksikan organisasi masyarakat dan hubungannya dengan lingkungan. Konsep tentang “guru”, “demokrasi”, “keadilan”, dan “anak laki-laki” mengandung makna sosial. Perbedaan makna sosial antara bahasa satu dengan bahasa lainnya cenderung besar. Pandangan dunia berkenaan dengan makna sosial tersebut.

Makna sosial dihasilkan dari konstruksi sosial realitas. Yang menjadi persoalan adalah ketika berhadapan dengan kata-kata yang mengandung makna sosial itu banyak anggota masyarakat menyikapinya sebagai kata yang mengandung makna alamiah sehingga kata-kata tersebut dianggap sebagai sesuatu yang berupa “pengetahuan umum” atau “akal sehat”. Dalam persoalan ini, Fowler (1986:148) menegaskan bahwa bahasa-bahasa itu beragam dalam mengodekan makna, bahkan dalam menganggap sebuah area dasar dan struktur-struktur pengalaman. Hal itu sesuai dengan rumusan Halliday bahwa bahasa melayani ekspresi, bahasa memiliki representasi, atau bahasa memiliki fungsi ideasional tempat penutur atau penulis mewujudkan pengalaman dari dunia nyata ke dalam bahasa.

Pengalaman dan pengodeannya dalam bahasa dibedakan dari individu satu dengan individu lainnya. Perbedaan itu bukanlah sesuatu yang acak, tetapi menurut konvensi yang mengatur peran individu dalam sistem sosial dan ekonomi. Konsekuensinya adalah bahwa pengalaman kita, apa yang kita ketahui, dan apa yang kita butuhkan selain sudah dikodekan dalam sumber makna kita yang bersifat personal, juga produk dari posisi kita dalam relasi-relasi sosio-ekonomis.

Tidak benar untuk berpikir bahwa setiap individu memiliki satu pandangan dunia atau ideologi yang tunggal, yang monolitik, yang meliputi seluruh aspek

kehidupannya (Fowler, 1986:149). Kita harus lebih berpikir bahwa fungsi ideasional menyediakan sebuah repertoar perspektif untuk sejumlah modus wacana tempat penutur berpartisipasi. Dengan rumusan lain, sebuah bahasa mewujudkan banyak cara untuk melihat dunia, bukan satu cara saja.

Kita mungkin saja memerhatikan gaya yang berbeda dalam diri penutur. Itu semua merupakan produk pilihan struktur lingual yang diulang secara teratur. Sifat keteraturan itu menetapkan variasi atau register wacana tertentu, seperti wacana hukum, tulisan ilmiah, jurnalisme populer, wacana politik, fiksi roman, dan sebagainya. Masalah perbedaan stilistika atau register berkorelasi dengan keadaan sosial dan ideologis yang membawa perbedaan signifikansi ideologis. Dengan demikian, gaya lingual yang berbeda dari pidato politik, misalnya, mengimplikasikan perspektif tertentu tentang topik-topik yang disuguhkan.

Ilmu Bahasa dan Fitur Lingual untuk Mengungkap Ideologi

Karena kajian budaya begitu *concern* pada dimensi ideologi yang diaktualisasikan melalui tanda-tanda bahasa, ilmu bahasa harus berangkat dari asumsi bahwa fitur-fitur lingual tertentu membawa dimensi ideologi tertentu. Dalam hubungannya dengan makna struktur lingual, sesuatu yang amat fundamental dalam pandangan Fowler (1986) dan Fairclough (1989) adalah terdapatnya fungsi hubungan antara konstruksi tekstual dengan kondisi-kondisi sosial, institusional, dan ideologis dalam proses-proses produksi serta resepsinya. Struktur-struktur lingual digunakan untuk menyistematiskan dan mentransformasikan realitas. Oleh karena itu, dimensi kesejarahan, struktur sosial, dan ideologi merupakan sumber utama pengetahuan dan

hipotesis dalam kerangka kerja kritisisme linguistik (Fowler, 1986:8).

Untuk melihat ideologi atau pandangan dunia dalam teks, menurut Fowler (1985; 1986), kita dapat menganalisis berbagai fitur lingual yang berbeda yang digunakan dalam penstrukturan ideasional, yakni (1) proses-proses leksikal, (2) ketransitifan, (3) piranti-piranti sintaksis, (4) modalitas, (5) tindak ujaran, (6) implikatur, (7) gilir tutur, (8) sapaan, nama, dan rujukan pribadi serta (9) fonologi.

Proses Leksikal

Proses leksikal adalah proses-proses yang terjadi dalam kosakata sebagai refleksi dan ekspresi kepentingan kelompok atau komunitas. Kosakata penutur memiliki pengaruh yang kuat dan menjadi indikator rentangan dan penstrukturan pengalaman penutur. Dalam pandangan kritis, kosakata diperlakukan sebagai fenomena yang bersifat dinamis. Kosakata diperlakukan secara amat dinamis dibandingkan dengan memperlakukan daftar kata dalam kamus yang mungkin saja amat membosankan.

Tiga hal yang perlu dianalisis dalam proses-proses leksikal meliputi (1) leksikalisasi, (2) kekurangan leksikal, dan (3) kelebihan leksikal. Setiap pilihan kosakata mengimplikasikan posisi ideologis tertentu.

- Secara sederhana, leksikalisasi berkaitan dengan keberadaan sebuah kata untuk sebuah konsep. Dari analisis leksikalisasi, mungkin saja, kita akan memperoleh informasi tentang generalisasi yang berlebihan atau penggunaan istilah yang konsisten yang keduanya mengandung makna sosial tertentu. Generalisasi yang berlebihan akan menciptakan kesan gaya berpikir yang cenderung kekanak-kanakan, naif, kepura-puraan, dan pengelakan. Penggunaan istilah yang konsisten akan menimbulkan kesan pengetahuan

spesialis, sifat suka menonjolkan keilmuan, obsesi, dan sebagainya.

- Kekurangan leksikal berkenaan dengan suatu keadaan di mana terjadi halangan pada istilah atau seperangkat istilah bagi konsep tertentu. Menurut Fowler (1986:152), kekurangan leksikal dimarkahi oleh dua piranti lingual, yaitu (1) penindasan atau penindihan istilah yang sedang dipakai dan (2) penggantian ekspresi kompleks yang sedang dipergunakan dalam register dengan istilah yang lebih sederhana. Dalam fenomena kekurangan leksikal itu, konsep atau objek yang rupanya tidak lazim dirasakan oleh penutur kemudian diubah dengan penggunaan kata-kata yang terlalu banyak dan tidak perlu.
- Kelebihan leksikal terjadi jika terdapat penggunaan yang melimpah dari istilah-istilah untuk objek atau konsep tertentu. Proses tersebut berupa tersedianya banyak sinonim atau sinonim yang mendekati. Beberapa pengarang banyak memanfaatkan kelebihan leksikal itu dengan menggunakan gaya hiperbola yang menciptakan kesan-kesan perayaan, pujian, dan pernyataan yang berlebihan.

Ketransitifan

Teori ketransitifan bersumber dari fungsi representasi bahasa, yakni fungsi bahasa yang bertugas (1) menyandikan (*encode*) pengalaman tentang dunia dan (2) membawa gambaran tentang realitas. Gambaran mental itu dapat berupa struktur frasa, klausa, dan kata. Ketransitifan adalah seperangkat kategori universal yang mencirikan jenis peristiwa dan proses yang berbeda, tipe partisipan yang berbeda dalam peristiwa tertentu serta berbagai keadaan tempat dan waktu dalam peristiwa yang terjadi.

Pangkal makna sebuah proposisi adalah “predikat” dan satu nomina atau lebih yang

terkait dengan predikat itu. Predikat membawa berbagai jenis aktivitas atau keadaan yang terkait dengan nomina itu. Mereka dibagi ke dalam beberapa tipe yang berbeda, yaitu (1) tipe tindakan, (2) tipe nontindakan, dan (3) tipe mental. Tipe tindakan (*action*) adalah sebuah gerakan atau tindakan yang disengaja dengan konsekuensi di bawah kontrol nomina. Tipe nontindakan terdiri atas dua macam, yaitu (1) keadaan (*states*) dan (2) proses. Tipe keadaan adalah tipe ketransitifan yang secara sederhana mencirikan kepemilikan objek. Tipe proses adalah tipe ketransitifan di mana peristiwa atau perubahan yang terjadi terhadap sesuatu tanpa kontrol mereka. Tipe mental adalah ketransitifan yang berbentuk “proses mental” dan “keadaan mental”.

Fowler (1986:157) menegaskan bahwa perbedaan sederhana antara tipe peristiwa dan keadaan peristiwa yang berbeda akan membawa gambaran yang berbeda tentang apa yang sedang terjadi dalam dunia. Hal itu tentu terkait dengan perbedaan ideologi atau pandangan dunia penuturnya. Perbedaan dalam memilih ketransitifan berarti perbedaan dalam pandangan dunia.

Piranti Sintaksis

Stilistika tradisional berpandangan bahwa variasi kalimat digunakan untuk mengekspresikan makna yang sama dengan fokus, cara pandang, dan penekanan yang berbeda. Pandangan itu perlu disempurnakan. Variasi kalimat berimplikasi terhadap perbedaan cara memandang dunia. Tiga piranti sintaksis yang dapat memberikan informasi tentang ideologi adalah (1) penghilangan (*deletion*), (2) pengurutan (*sequencing*), dan (3) kekompleksan (*complexity*).

- Penghilangan adalah piranti sintaksis yang menghilangkan bagian tertentu dalam klausa karena alasan tertentu. Dalam kaidah elipsis, misalnya, peng-

hilangan dilakukan karena alasan mitra tutur sudah mengetahui apa yang dimaksudkan. Dalam kaidah pasif, penghilangan sering dilakukan untuk menyembunyikan agen (pelaku).

- Pengurutan berkenaan dengan modus penyampaian dengan urutan yang berbeda, terutama pada pelaku (*agent*). Hal itu dapat diperhatikan, misalnya, dalam modus aktif dan pasif. Dalam pandangan kritis, semua aturan pengurutan adalah piranti retorik untuk memanipulasi perhatian pendengar.
- Kekompleksan berkenaan dengan kerumitan susunan kalimat. Kekompleksan kalimat terjadi ketika beberapa klausa disusun dalam satu rangkaian kalimat: klausa koordinatif dan subordinatif. Kekompleksan klausa subordinatif mengimplikasikan relasi-relasi logis. Kekompleksan klausa koordinatif mengimplikasikan urutan dari proposisi yang terpisah-pisah. Klausa koordinatif sering diasosiasikan dengan modus wacana yang naif dan primitif.

Modalitas

Modalitas adalah fitur lingual yang menunjukkan tingkat komitmen atau sikap penutur terhadap proposisi yang mereka tuturkan atau sikap terhadap pendengar. Berbagai modal dalam bahasa tertentu dapat menginformasikan tingkat komitmen dan sikap penutur itu. Dalam bahasa Indonesia, misalnya, dari analisis terhadap modalitas dapat menginformasikan bahwa seseorang dapat menyatakan ‘keinginan’, ‘harapan’, ‘ajakan’, ‘pembiaran’, ‘per-mintaan’, ‘kemungkinan’, ‘keteramalan’, ‘keharusan’, ‘kepastian’, ‘perintah’, ‘izin’, ‘larangan’, ‘kemampuan’, dan ‘kesanggupan’.

Tindak Ujaran

Kajian tindak ujaran menunjukkan bahwa sebuah ujaran tidak hanya mengomunikasikan makna proposisi, tetapi juga

mencapai tindakan melalui ujaran, seperti berjanji, memerintah, meminta maaf, dan sebagainya. Makna tindak ujaran menekankan pada kekuatan pragmatik ujaran, kemampuannya tidak hanya mendeksripsikan dunia, tetapi juga mengubah dunia.

Konvensi-konvensi tindak ujaran mewujudkan representasi ideologis subjek dan relasi-relasi sosialnya. Melalui ujaran, penutur dapat mengartikulasikan relasi-relasi kuasa yang melekat pada dirinya. Tindak ujaran berimplikasi pada penetapan dan pemertahanan relasi-relasi kuasa.

Implikatur

Grice sudah menunjukkan, bahwa implikatur dihasilkan sering melalui pelanggaran yang nyata terhadap konvensi kerjasama yang membangun percakapan. Ada dua catatan terhadap hal ini. *Pertama*, sebuah implikatur bukan sebuah “kecelakaan”, tetapi produk tindakan yang bertujuan atau memiliki motivasi tertentu. Hal itu berkaitan dengan status dan otoritas. *Kedua*, melalui sebuah implikatur, seorang penutur memaksakan ideologinya kepada orang lain.

Gilir Tutur

Kajian terhadap gilir tutur menunjukkan bahwa sebuah percakapan bukanlah sesuatu yang bebas dan tanpa aturan, tetapi terdapat aturan untuk urutan kontribusi peserta dan gilir tuturnya. Dari gilir tutur dapat diperoleh berbagai informasi: (i) siapa yang berkuasa dan siapa yang dikuasai, (ii) siapa mengontrol pembicaraan dan siapa yang dikontrol, (iii) siapa yang sering mengambil giliran tanpa memerhatikan kaidah yang sudah disepakati, dan sebaliknya.

Sapaan, Nama, dan Rujukan Pribadi

Kajian terhadap sapaan, nama, dan rujukan pribadi menunjukkan bahwa terdapat dimensi kuasa dan solidaritas dari pilihan terhadap sapaan, nama, dan rujukan

pribadi itu. Pilihan pronomina persona kedua “dia” dan “beliau” menginformasikan banyak hal tentang kuasa dan solidaritas itu. Demikian juga dengan penggunaan “Anda” dan “Bapak” akan menginformasikan relasi-relasi kuasa dan solidaritas itu.

Fonologi

Kajian terhadap fonologi menunjukkan bahwa bunyi dan pola-pola bunyi berkorelasi dengan stratifikasi dan kelas sosial dalam masyarakat. Sebuah fonem tertentu hanya diucapkan oleh satu kelas sosial tertentu, dan tidak atau jarang diucapkan oleh kelas sosial lainnya. Bahkan, dalam kajian vokal ditemukan bahwa kebundaran mulut saat membunyikan vokal bundar menginformasikan apakah orang itu berasal dari kelas borjuis atau sebaliknya dari kelas pekerja.

PENUTUP

Kajian bahasa sudah seharusnya menempatkan dimensi kritis untuk menerjemahkan apa yang dikehendaki dalam kajian budaya. Kajian bahasa harus lebih menjawab pertanyaan “mengapa” sebuah bentuk dan makna dipilih dalam komunikasi. Bukan waktunya lagi memertentangkan “bahasa sebagai sistem” dan “bahasa sebagai penggunaan” dalam kajian bahasa. Keduanya saling melengkapi dan menyempurnakan untuk menemukan ideologi tersembunyi dari penutur.

Linguistik dalam perspektif kajian budaya bertujuan mengungkap relasi kuasa tersembunyi dan proses-proses ideologis. Linguistik harus lebih banyak memusatkan pada kajian teks-teks yang aktual, teks yang dihasilkan dalam perebutan komunikatif, teks yang selalu terkait dengan positionalitas, teks yang akrab dengan kekinian-kenantian, kedisinian-kedisanaan, teks yang diproduksi oleh siapa, kapan, dan untuk apa, teks yang tidak mengawang-awang di udara, teks yang merealisasikan pelbagai

modus wacana, dan teks yang selalu berada pada konteks.

DAFTAR RUJUKAN

- Barker, C. 2000. *Cultural Studies: Teori dan Praktik*. Terjemahan oleh Nurhadi (2004). Yogyakarta: Penerbit Kreasi Wacana.
- Birch, D. 1996. Critical Linguistics as Cultural Process. Dalam James, J.E. (Ed.), *The Language-Culture Connection* (hlm. 64—85). Singapore: SEAMEO Regional Language Centre.
- Cavallaro, D. 2001. *Teori Kritis & Teori Budaya*. Terjemahan oleh Laily Rahmawati (2004). Yogyakarta: Niagara.
- Crystal, D. 1991. *A Dictionary of Linguistics and Phonetics*. Third Edition. Oxford: Basil Blackwell Ltd.
- Fairclough, N. 1989. *Language and Power*. New York: Longman Group UK Limited.
- Fairclough, N. 1995. *Critical Discourse Analysis: The Critical Study of Language*. Harlow-Essex: Longman Group Limited.
- Fowler, R. 1985. Power. Dalam van Dijk, T. (Ed.), *Handbook of Discourse Analysis Volume 4: Discourse Analysis in Society* (hlm. 61—82). London: Academic Press.
- Fowler, R. 1986. *Linguistic Criticism*. Oxford: Oxford University Press.
- Fowler, R. 1996. On Critical Linguistics. Dalam Caldas-Coulthard, C.R. & Coulthard, M. (Eds.), *Texts and Practices: Reading in Critical Discourse Analysis* (hlm. 3—14). London: Routledge.
- Halliday, M.A.K. 1978. *Language as Social Semiotic: The Social Interpretation of Language and Meaning*. London: Edward Arnold.
- Santoso, A. 2006. *Bahasa, Masyarakat, dan Kuasa: Topik-Topik Kritis dalam Kajian Ilmu Bahasa*. Malang: Jurusan Sastra Indonesia, Fakultas Sastra, Universitas Negeri Malang.
- Storey, J. 1993. *Teori Budaya dan Budaya Pop: Memetakan Lanskap Konseptual Cultural Studies*. Terjemahan Dede Nurdin (2003). Yogyakarta: Qalam.